

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya pemalsuan identitas. Sedangkan dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang tentang “ Tinjauan Hukum Proses Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas ” dengan pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut: 1.) Bagaimanakah proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara Nomor 1276/Pdt.G/2009/PA.Smg, 2.) Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Semarang.

Untuk menjawab permasalahan diperlukan penelitian untuk memperoleh data, dengan demikian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini memperoleh sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder, dan analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumen.

Dari hasil penelitian yang didapat perkawinan antara saudara kandung Penggugat dengan Tergugat II dinyatakan ada dan benar serta memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembahasan menunjukkan bahwa: 1) Pembuktian dilakukan secara berimbang antara Penggugat dan Tergugat karena dalil gugatan Penggugat dibantah maka sama – sama diberi hak untuk membuktikan, pembuktian dari pihak Penggugat dan pembuktian dari pihak Tergugat atas bantahannya, serta hakim berpedoman saat akad nikahnya menggunakan akad secara Islam dan beban pembuktian teletak pada para pihak berperkara, bukan terletak pada hakim dan dasar hukum yang digunakan hakim untuk menolak pembatalan perkawinan karena alasan yang dikemukakan Penggugat tidak ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 71 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan ini hanya keberatan secara sepihak mengenai agama yang digunakan saat melakukan akad perkawinan. 2.) Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak – anak, harta bersama, dan orang – orang ketiga dan status hukumnya menjadi kembali seperti sebelum adanya perkawinan. Sesuai dengan Pasal 28 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas.

ABSTRACT

Cancellation of marriage can happen because of many various reasons, one of them is forgery of identity. While in constitution No.1 Year 1974 do not be explained in detail about cancellation of marriage because of forgery of identity. Pursuant to background of writer interest to do research in Semarang Religious Courts about " Evaluation Law Process the Solving Of Dispute Cancellation Of Marriage Of Effect Forgery of Identity " with problems fundamental to be studied pursuant to the following problem formula: 1.) How verification process and consideration of law used by judge to verdict Number 1276/Pdt.G/2009/PA.Smg, 2.) How legal consequences of cancellation of marriage because of forgery of identity in Semarang Religious Courts .

To answer problems needed by research to obtain data, there by use method approach of normative jurisprudence with specification of descriptive research of analysis. This research take location in Semarang Religious Courts. This Research obtain get the source of data coming from primary data and data of sekunder, and data analysis the used is qualitative with its data collecting technique use document study and interview.

From result of got by research is marriage between Plaintiff blood brother Sued by II expressed there is and real correct and also pursuant to which included in article 2 constitution of No.1 Year 1974 jo article 14 and article 30 Compilation of Islamic Law. In the discussion showed that 1) Verification conducted by proportional between Plaintiff and Sued by because argumentative by Plaintiff suing theorem hence is same given the right is same to prove, verification of Plaintiff party and verification of party Sued of its protest, and also judge of be guided moment of contract do marry use contract Islamly and burden verification of situated at law the parties, not laying in used by legal fundament and judge to refuse cancellation of marriage because reason of which is told by Plaintiff there no in article 26 and article 27 constitution of No.1 Year 1974 jo article 71 and article 72 Compilation of Islamic Law and this reason only religious objection unilaterally which used by moment conduct marriage contract. 2.) Legal consequences of cancellation of not applicable marriage of ebb to children, community property, and people - third person and its law status become again like before existence of marriage. As According to article 28 constitution of No.1 Year 1974 jo article 75 Compilation of Islamic Law.

Keyword : Cancellation Of Marriage, Forgery of Identity.